

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TUNGKE KECAMATAN  
BENGO KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

OLEH

**FITRIA NUR  
4515021018**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fitria Nur  
NIM : 4515021018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan  
Infrastruktur Di Desa Tungke Kecamatan Bengo**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

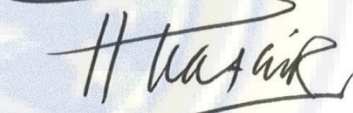
Makassar, September 2019

Pembimbing I



**Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd**  
**NIDN: 0904046601**

Pembimbing II



**Drs. Natsir Tompo, M.Si**  
**NIDN: 0901065901**

**Mengetahui :**

Dekan Fisipol  
Universitas Bosowa



**Arief Wicaksono, S.IP, M.A**  
**NIDN : 0927117602**

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara



**Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si**  
**NIDN : 0915098603**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, Skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tungke Kecamatan Bengo”**

Nama : Fitria Nur

NIM : 4515021018


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

### PANITIA UJIAN

Ketua  
  
**Arief Wicaksono, S.IP, M.A**  
Dekan Fisipol Universitas Bosowa

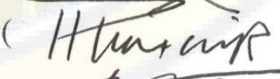
Sekretaris  
  
**Nining Hasliada Zainal, S.Sos, M.Si**  
Ketua Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara

### TIM PENGUJI

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

(  )

2. Drs. Natsir Tompo M.Si

(  )

3. Dr. Udin B. Sore, SH. S.Ip., M.Si.

(  )

4. Ade Ferry Afrisal, SH., M.SC

(  )

## ABSTRAK

Fitria Nur, 4515021018, 2019, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Syamsuddin Maldun dan Natsir Tompo.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keterlibatan dan pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan di Desa Tungke Kec. Bengo Kab. Bone. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, panyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian dengan fokus 1) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal: (a) Keterlibatan dalam tahap perencanaan terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan dan relatif masih rendah. (b) Keterlibatan dalam tahap pelaksanaan tergolong baik. (c) Keterlibatan dalam tahap pengawasan tergolong tinggi. 2) Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke yaitu keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dengan indikator (a) Sumbangan dan dukungan. (b) Kesadaran atau kemauan masyarakat. (c) Adanya dana Desa.

***Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan, Infrastruktur***

## ABSTRACT

Fitria Nur, 4515021018, 2019, State Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Community Participation in Infrastructure Development in Tungke Village, Bengo District, Bone Regency, under the guidance of Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd and Drs. Natsir Tompo, M.Sc

The purpose of this paper is to determine the involvement and influence of community participation in the process of infrastructure development and in the Village of Tungke Kec. Bengo Kab. Bone. This type of research is a qualitative descriptive, data collection method through observation, documentation and interviews. Data sources are primary data and secondary data. Data analysis techniques through data collection, data education, data presentation, drawing conclusions and data verification.

The results of the study with focus 1) Community involvement in infrastructure development in Tungke Village in general has been going well but has not been maximized: (a) Involvement in the planning stage has increased but is not significant and is still relatively low. (b) The involvement in the implementation phase is classified as good. (c) Involvement in the supervision stage is high. 2) The effect of community participation in the implementation of infrastructure development in Tungke Village, namely the success of infrastructure development in Tungke Village, highly dependent on community participation with indicators (a) Donations and support. (b) Community awareness or will. (c) Village funds are available.

***Keywords: Development, Participation, Infrastructure***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi penulis.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak menghadapi kendala namun atas berkat bantuan semua pihak, dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, seyogyanya penulis menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya ditujukan kepada yang terhormat:

1. Terima kasih dan sembah sujudku serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orangtua, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang dan doa yang tiada hentinya.
2. Kepada Bapak Prof.Dr.Ir.Muhammad Saleh Pallu,M.Eng. Sebagai Rektor Universitas Bosowa Makassar
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd. Natsir Tompo,M.Si. sebagai pembimbing I dan Drs. Nasir Tompo, M.Si. sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
4. Bapak Arief Wicaksono,S.Ip.,M.A Selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa Makassar

5. Ibu Nining Haslinda Zainal,S.Sos,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan pelajaran dan tambahan ilmu bagi penulis selama menjalani perkuliahan
7. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam kepengurusan administrasi.
8. Kepala Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para Staf Kantor desa Tungke beserta seluruh masyarakat Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang telah memberikan dukungan dan informasi pada penelitian ini.
10. Saudara-saudariku tercinta, Arisal, Jum, Aedhin, Niar, Wawan, Fia serta seluruh keluarga besarku atas motivasi dan do'anya.
11. Saudara-saudariku Administrasi Negara 015, Petisi 015, BEM FISIP, HIMAN Universitas Bosowa Makassar.
12. Sahabatku Izhel, Indah, Andi yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis.
13. Terima kasih pula teman-teman KKN-KWU Universitas Bosowa Angkatan 45 terkhususnya Desa Bonto Lojong posko dua Izhel, Jum, Sisi, Nopi, Damar, Ranggong, Dillong, Rezki, Alam dan Edwin. Kalian luar biasa.
14. Kepada yang terbanggakan Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi penulis ruang untuk menimbah ilmu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya dan mudah-mudahan mendapat balasan pahala yang setimpal.

Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan yang terbaik kepada kita semua. Aamiin.

Makassar,

2019

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Konsep Pembangunan.....	11
B. Konsep Partisipasi.....	19
C. Konsep Infrastruktur .....	27
D. Penelitian Terdahulu .....	31
E. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	33
A. Lokasi dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data Penelitian .....	33
D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian . .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Informan Penelitian.....	36
G. Teknik Pengabsahan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

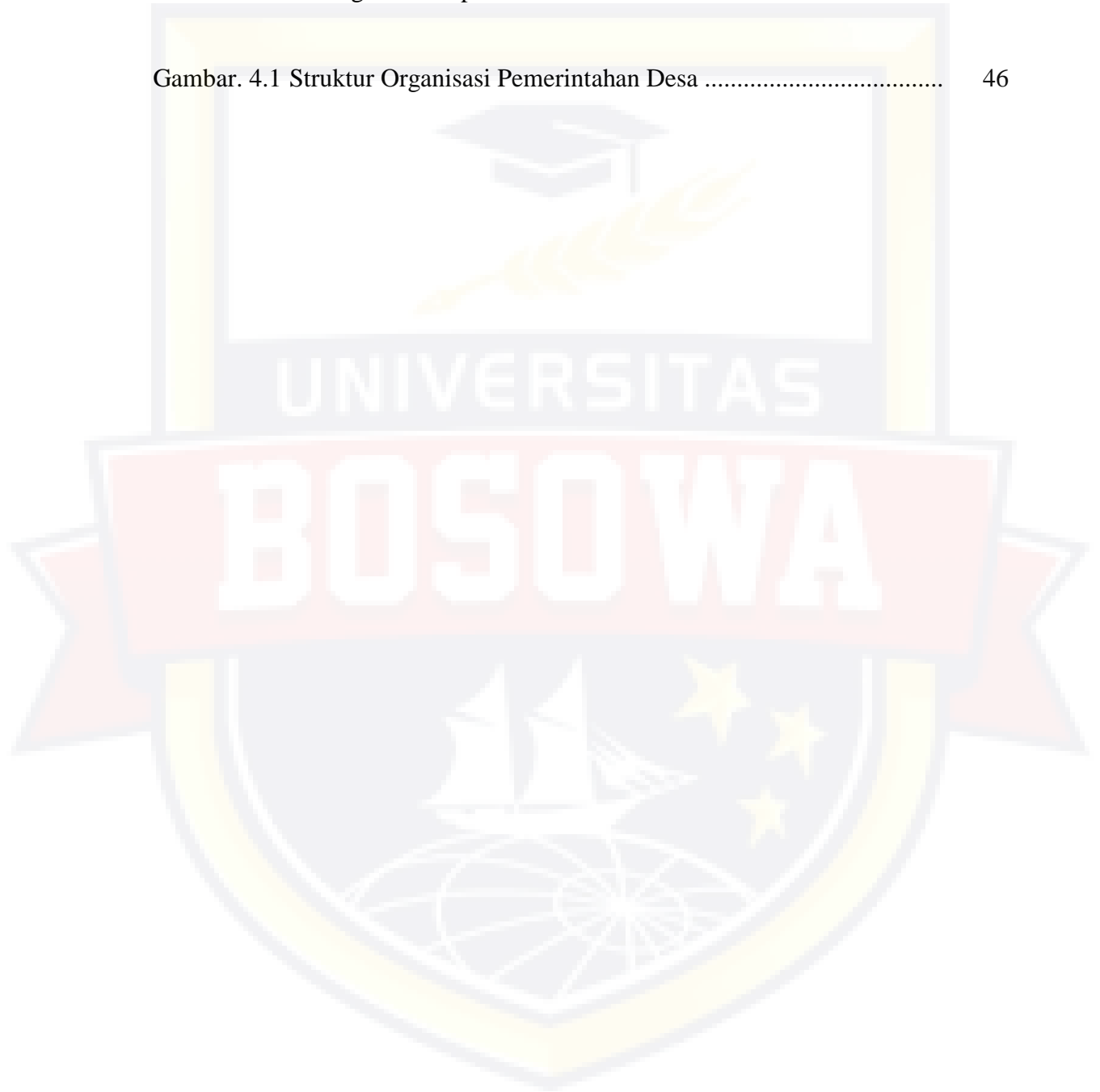
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum.....	40
1. Sejarah Desa Tungke.....	40
2. Keadaan Geografis .....	41
3. Visi dan Misi Desa Tungke.....	43
B. Hasil Penelitian .....	46
1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke.....	46
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tungke .....	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke.....	68
2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tungke .....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tangga Partisipasi menurut Arnstein .....	17
Tabel 2.2.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1	Daftar Nama-nama Kepala Desa Tungke .....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 4.3	Daftar Hadir Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tungke Tahun 2018 .....	47
Tabel 4.4	Daftar Hadir Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tungke Tahun 2019 .....	48
Tabel 4.5	Daftar Usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	50
Tabel 4.6	Swadaya Masyarakat dalam Bentuk Uang di Desa Tungke .....	56
Tabel 4.7	Kegiatan Pembuatan/Perintisan Jalan di Desa Tungke .....	57
Tabel 4.8	Tim Pelaksana Pengawasan dan Evaluasi Pembuatan Jalan Tani Desa Tungke .....	62
Tabel 4.9	Surat Pernyataan Penggunaan Lahan/Tanah .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan produk pemerintahan menetapkan tahapan-tahapan yang dituangkan dalam rencana pembangunan, dimana dalam setiap pembangunan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat. Untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 menyatakan partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat di beri peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya mejadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk dijadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun desa berarti membangun sebagian besar

penduduk Indonesia. Hal ini mudah di mengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara.

Dengan demikian pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Salah satu faktor dari pembangunan yang masih menjadi masalah di negara Indonesia ialah pembangunan dalam bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Lahirnya Undang-undang tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia karena lebih baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk

mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur dengan kualitas berstandar nasional, baik dalam bentuk pengatutan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki infrastruktur kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.



Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desadi mana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam

kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita 2006:34).

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan agar mencapai sasaran yang diinginkan, maka partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab tanpa dukungan dari seluruh masyarakat maka setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sudah barang tentu tidak terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk kesadaran masyarakat diharapkan untuk turut aktif dalam setiap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam proses pembangunan yang dilakukan di daerahnya.

Proses pembangunan tersebut tidak hanya memerlukan partisipasi masyarakat saja. Namun yang menjadi masalah sekarang ini bagaimana implementasinya, yaitu ada atau tidaknya partisipasi masyarakat secara sukarela serta bagaimana menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam

pembangunan sebab partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas dalam pembangunan melainkan juga dalam proses perencanaan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu:

1. Secara bertahap membebaskan semua sewa dari keterpencilan dengan pembangunan prasarana perhubungan yang dapat memperlancar hubungan desa dengan kecamatan dan kota.
2. Menata kembali daerah-daerah yang terlalu padat penduduknya.
3. Meningkatkan mutu aparatur pemerintah agar mampu menyelenggarakan administrasi pemerintah bagi kelancaran pembangunan. Khususnya pembangunan daerah serta dapat mendorong penduduk untuk dapat berprakarsa dalam pembangunan menggerakkan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan.
4. Menggerakkan koordinasi terhadap semua program pembangunan daerah.
5. Memberikan bantuan terhadap pembangunan daerah untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Tungke, Pemerintah setempat sudah melakukan peran dengan semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk dijadikan tempat pembangunan yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk melakukan pembangunan. Serta adanya penolakan dari

masyarakat karena ketidaksesuaian antara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar dapat memudahkan penelitian maka peneliti memberikan beberapa batasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan dalam sektor infrastruktur.
2. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut andil dalam setiap proses pembangunan desa termasuk dalam pembangunan infrastruktur.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?
2. Bagaimanan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

### b. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berfokus pada kajian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakatan diberbagai bidang khususnya pada pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Partisipasi Masyarakat

##### 1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*", *take a part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunana. Partisipasi dalam konteks pembangunana desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari ahsil pelaksanaan kegiatan serta kegiatan warga dalm mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metedologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Chandra (2003: 5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan berjaya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan maksimal. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut.

## 2. Bentuk-bentuk Partisipasi

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan keikutsertaan seseorang, atau kelompok atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang kelompok atau masyarakat senantiasa dapat



memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Hurerah (Septiyasa 2013: 6) adalah:

- 1) Partisipasi buah pikiran.
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipandalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sejalan dengan pemikiran diatas Hobley mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :

- 1) Partisipasi pasif, yaitu informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi informative, yaitu masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi.
- 3) Partisipasi, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi.
- 4) Konsultatif, yaitu tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.

- 5) Partisipasi fungsional, yaitu masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.
- 6) Partisipasi interaktif, yaitu Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
- 7) Zelf mobilization ( mandiri ), yaitu masyarakat memegang kendali pemanfaatan sumber daya yang ada.

Menurut Sondang P Siagian (2014:2), terdapat dua jenis partisipasi dalam pembangunan yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang tidak ikut berperan aktif dalam setiap pembangunan yang ada dimasyarakat. Sedangkan Partisipasi aktif dapat berupa terlaksananya pembangunan sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan. Partisipasi aktif dapat terwujud apabila:

- 1) Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasi.
- 2) Mewujudkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib sendiri kepada oranglain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal.
- 3) Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.
- 4) Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kerelaan merupakan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan lebih penting.

Dusseldrop (2015: 200), mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

### 3. Tingkatan Partisipasi

Wilcox(Theresia 2014: 202) mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi.
- 2) Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjamin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5) Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya penataan ruang diantaranya karena beberapa hal positif yang dikandungnya :

- 1) Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai.
- 2) Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang rendah.
- 3) Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- 4) Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- 5) Mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. (Sastropoetra:2007)

Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Arnstein dapat dibedakan dalam anak tangga sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tangga Partisipasi menurut Arnstein

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	Kontrol masyarakat ( <i>citizen control</i> ) Pelimpahan kekuasaan ( <i>delegated control</i> ) Kemitraan ( <i>Partnership</i> )
<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penentraman ( <i>Placation</i> ) Konsultasi ( <i>consultation</i> ) Informasi ( <i>information</i> )
<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi ( <i>therapy</i> ) Manipulasi ( <i>manipulation</i> )

(sumber: Arnstein dalam Sari 2016: 63)

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menurut UU No. 25 tahun 2004 ialah masyarakat bersama pemerintah merupakan *stakeholder* dalam proses pembangunan. Artinya masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan tadi, diberikan yang cukup sentral.

Di dalam pembangunan agar kiranya masyarakat tadi dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan ataupun proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan keilmuan.

Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan Membangun dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Menurut Ndraha, upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain :

- 1) Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki.

- 2) Menyesuaikan program Pemerintah dengan kebutuhan ( keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 3) Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi.

Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat, komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau kebutuhannya kepada pemerintah.

## **B. Konsep Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan yaitu proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Di samping itu, sebagai proses perubahan perubahan yang diharapkan, melalui transformasi structural atau tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat di lihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang di beri kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional dan nasional (Soetomo,2008:27).

Pembangunan desa menempatkan dirinya ke dalam tiga sifat, yaitu:

Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha di desa. Masyarakat adalah subjek pembangunan.

- 1) Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa dan memerlukan keikutsertaan masyarakat ada.
- 2) Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan sebagai gerakan maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.

Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting perannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.



Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah (2004:14) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa:

*“Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkeinginan dan melaksanakan pembangunan itu”.*

Di dalam pembangunan terkandung begitu banyak pokok – pokok pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.

2) Proses pembangunan yang terjadi bukanlah suatu yang sifatnya alami atau “*given*”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang (akan) harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai. Alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan dan cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko yang harus dihadapi.

3) Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri (swakarsa, swadaya, swadana) mengambil keputusan untuk memilih alternatif-alternatif “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

- 2) Menjamin terciptanya integritasi, dan sinergi antar daerah, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- 2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi tertibnya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- 3) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- 4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang sesuai dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

## 2. Pengendalian Pembangunan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan (pemantauan) adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan tentunya memiliki landasan kewenangan terhadap pengendalian pembangunan. Berikut ini landasan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pembangunan:

- 1) Hak atas lahan (*Bundles of rights*), yaitu kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.
- 2) Pengaturan (*Police Power*), yaitu kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan.
- 3) Pencabutan hak atas lahan (*Eminent Domain*), yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.

4) *Taxation*, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.

5) *Spending power (Government Expenditure)*, yaitu kewenangan membelanjakan dana public untuk kepentingan umum (melalui APBN dan atau APBD).

Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang. Namun dilain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak “*over*” agar tidak terjadi hal yang buruk. Tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang terus dilakukan oleh pemerintah.

### 3. Unsur-unsur Pembangunan

Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan rencana.
- 2) Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya.
- 3) Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.

- 4) Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah.
- 5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan
- 6) Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### **C. Konsep Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Dalam kehidupan manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat melakukan aktivitasnya tersebut, masyarakat membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung mereka dalam beraktivitas. Berbagai pelayanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga dengan infrastruktur.

Peran infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan

infrastruktur mempengaruhi marginal *productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Infrastruktur menurut Grigg (2003: 60) merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dari fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipindahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Dari definisi tersebut Grigg membagi infrastruktur dalam tiga belas kategori yang meliputi :

- 1) Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (treatment plant).
- 2) Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengelolaan, pembuangan dan daur ulang.
- 3) Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- 4) Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.



- 5) Fasilitas lintas air dan navigasi.
- 6) Fasilitas transportasi : jalan rel, bandar udara, termasuk didalamnya adalah tanda dan fasilitas pengontrol.

- 7) Sistem transit publik.
- 8) Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- 9) Fasilitas gas alam
- 10) Gedung publik : Kantor, sekolah, rumah sakit
- 11) Fasilitas perumahan publik
- 12) Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain

termasuk stadion.

- 13) Komunikasi.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopangkegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan yang tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Dalam perbaikan pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Tungke melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitasnya.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2006 jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Klasifikasi jalan di bagi menurut fungsi, kelas jalan, medan jalan dan wewenang pembinaan jalan.

Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas tiga golongan yaitu:

- 1) Jalan arteri, jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

2) Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan penumpang/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3) Jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setemoat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dianggap cukup penting oleh penulis karena sekaligus juga menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini dapat diketahui. Penelusuran ini juga sebagai tindakan penulis untuk membuktikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan sekarang ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini akhirnya dapat terjamin. Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul / Nama Peneliti	Fokus / Indikator	Temuan
1.	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) (Mukhamad Hendra Kurniawan: 2014)	Partisipasi Masyarakat, Pembangunan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PPIP masih kurang baik, sehingga pembangunan pavingisasi mengalami keterlambatan satu bulan.
2.	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (Wahyuddin, 2018)	Analisis Partisipasi, Pembangunan, Masyarakat Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tanah karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa tergolong sangat tinggi.
3.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Dwi Nurhasanah: 2017)	Partisipasi masyarakat, Pembangunan Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan masyarakat belum berpartisipasi.

### **E. Kerangka Konseptual**

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung optimal apabila di dukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan keaktifan waktu serta kemampuan wawasan masyarakat dalam rangka menyumbangkan ide dalam kepentingan pembangunan.

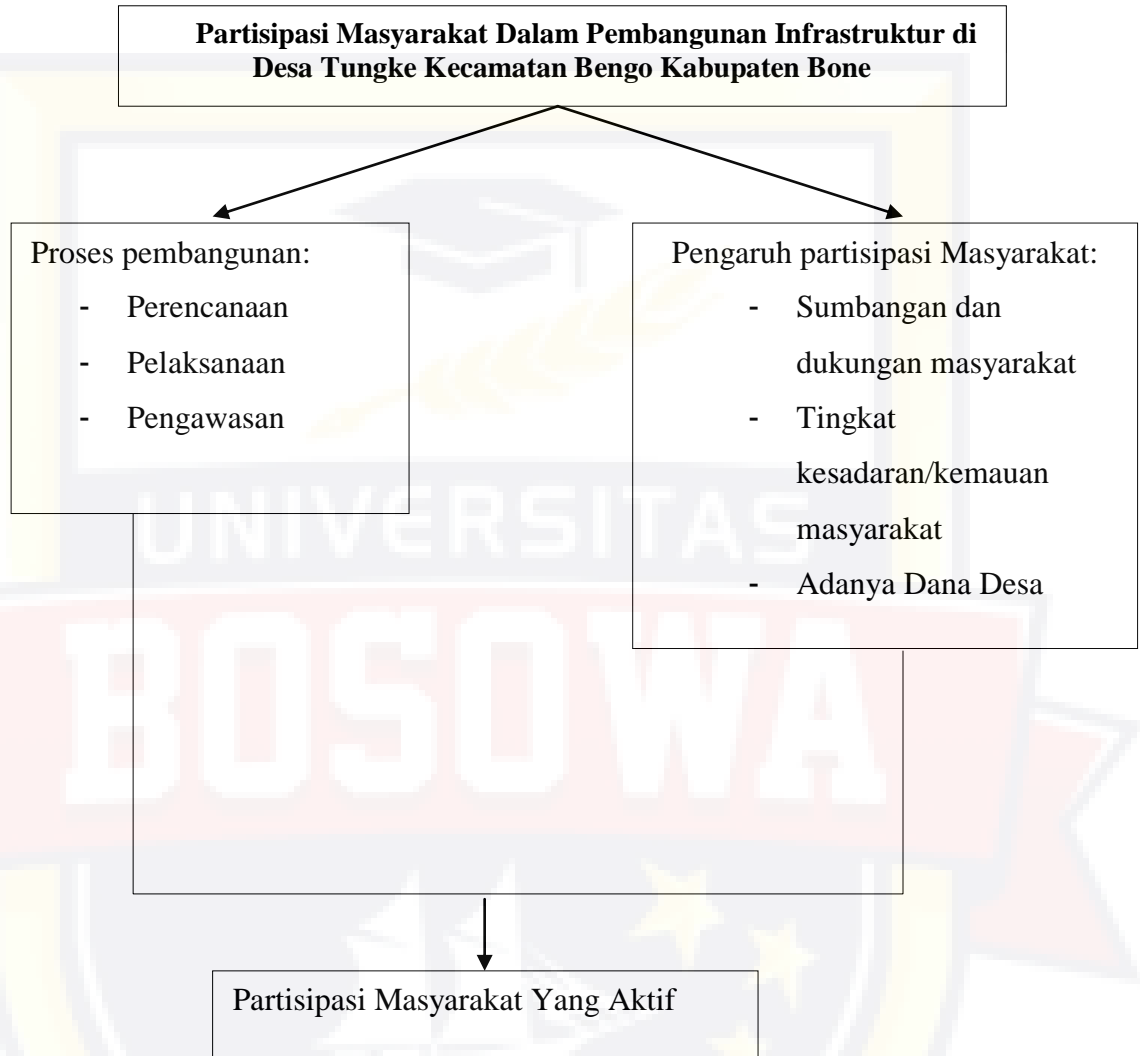
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pembangunan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari perimbangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektivitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Pembangunan di desa salah satunya dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif.

Dalam realitanya, tantangan infrastruktur berpengaruh terhadap kemauan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, karena pembangunan infrastruktur yang baik apabila masyarakat turut berpartisipasi didalamnya.

Gambaran singkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur melalui bagan berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih Desa Tungke karena dalam proses pembangunan di Desa Tungke saya melihat bahwa masyarakat masih kurang berpartisipasi.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai atau penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi mengenai partisipasi masyarakat di desa Tungke dalam pembangunan infrastruktur.

Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data-data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data peneliti yang dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan

wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dapat menggambarkan hasil penelitian lebih muda.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang bersal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian serta penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.

### **D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian**

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Menurut Spradley (Sugiyono 2016: 209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:

- a) Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
- b) Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
- c) Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.



- d) Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi fokus dan indikator dalam penelitian ini adalah:

- a) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- b) Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, seperti adanya kemauan, dukungan serta adanya dana desa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

##### **2. Wawancara mendalam**

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face* kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini di kenal dengan teknik wawancara *deep interview* yaitu proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanyajawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

### 3. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber data yang tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet, dan lain-lain.

## F. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dipilih secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mengetahui masalah yang diteliti dan mereka terlibat langsung dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Tunge dengan jumlah yang tidak ditentukan. Adapun sumber data informan yang dianggap dapat memberi data sesuai kebutuhan tersebut.

- a. Kepala Desa : 1 orang
  - b. Perangkat Desa : 2 orang
  - c. Masyarakat : 6 orang +
- 
- 9 orang

### **G. Teknik Pengabsahan Data Penelitian**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pemeriksaan data dan menggunakan kriteria.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Mathinson (Sugiyono 2016:241) menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, data yang diperoleh akan lebih konsisten, lebih pasti dan tuntas. Menurut Wiersma (Sugiyono 2016: 273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga metode triangulasi, yaitu:

#### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

## 2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakkuratan.

## 3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

## H. Teknik Analisis Data Penelitian

Didalam penelitian ini data yang telah digunakan telah dikumpulkan dan dijelaskan untuk teknik analisa data deskriptif yaitu, data-data yang telah dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang telah diteliti.

Adapun mengenai teknik analisa data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Satori dan Komariah 2010: 338) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusutan, perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksi, meringkas, dan memberi kode, menelusuri tema dan gugus-gugus, dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono.(2010 : 338) mengatakan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polahnya serta membuang yang tidak perlu.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menghubungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih, misalnya diluangkan dalam bentuk berbagai matriks, grafik, jaringan dan bagan. lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiono (2010 : 341) bahwa yang paling sering digunakan penyajian data dalam penelitian ini kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari inti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjas, konfigurasi-konfigurasi yang sesuai dengan sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasikan, yaitu pemikiran kembali dan melintas ke pikiran penganalisa selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon untuk komentar responden yang telah diaring untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Tungke

Desa Tungke merupakan salah satu dari Sembilan desa yang ada di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Desa Tungke terdiri dari atas tiga dusun yaitu, dusun Matango, dusun Seppange dan dusun Coppobulu.

**Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Kepala Desa Tungke**

No.	Nama Kepala Desa	Tahun
1.	A.Muhammad	1964
2.	Abd. Hamid	1965
3.	Ramli Hamid	1995 – Sekarang

*Sumber data: Profil Desa Tungke 2019*

Berdasarkan tabel di atas bahwa sudah terjadi 3 kali pergantian masa kepemimpinan di Desa Tungke. Terbentuknya Desa Tungke dipimpin oleh A.Muhammad yang merupakan Kepala Desa pertama pada tahun 1964. Selanjutnya pada tahun 1965 pejabat sementara Kepala Desa Tungke menyerahkan Pemerintahannya kepada Abd.Hamid sebagai pejabat sementara Kepala Desa Tungke hingga tahun 1970. Pada tahun 1970-1977 diadakan pemilihan kepala Desa Tungke yang pertama secara aklamasi ditetapkan Kepala Desa Tungke Abd.Hamid sampai pada tahun 1978-1985. Pada tahun 1985-1993 diadakan pemilihan kepala Desa Tungke yang kedua yang ikuti dua calon Kepala Desa dan akhirnya terpilihlah kembali Abd.Hamid, namun beliau tidak sempat di lantik disebabkan beliau meninggal dunia. Pada tahun

1993 Ramli Hamid sebagai pelaksana tugas sampai tahun 1995. Pada tanggal 24 Februari 1995 SK Ramli Hamid diterbitkan sebagai pejabat sementara Kepala Desa Tungke sampai dengan tanggal 5 Juni 1995. Pada tahun 1999 diadakan pemilihan kepala Desa yang diikuti oleh dua calon kepala desa dan yang terpilih adalah Ramli Hamid. Tahun 2015 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan Ramli Hamid kembali terpilih.

## 2. Keadaan Geografis

Dalam proses kehidupan manusia yang hidup berkelompok, dan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan manusia, di samping ia punya hubungan timbal balik antara sesamanya, ia juga terikat dengan alam sekitarnya.

Keadaan geografis suatu daerah merupakan salah satu faktor yang penting dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berbagai macam masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dan salah satu usaha untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan keadaan suatu daerah, khususnya masyarakat di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung untuk mengetahui keadaan masyarakat di daerah tersebut.

### a) Letak Geografis Desa Tungke Kecamatan Bengo

Kecamatan Bengo berada di wilayah Kabupaten Bone yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lappariaja pada tahun 1995, yang terdiri dari sembilan Desa, di antaranya adalah Desa Tungke.

Desa Tungke Kecamatan Benge memiliki luas wilayah  $\pm 1.995 \text{ km}^2$ , dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah timur : Desa Pattimpa Kecamatan Ponre
- Sebelah utara : Desa Selli
- Sebelah selatan : Desa Samaenre
- Sebelah barat : Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja

Desa Tungke terdiri dari tiga dusun:

- Dusun Matango
- Dusun Seppange
- Dusun Coppobulu

#### b) Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.662 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.822 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.890 jiwa. Seluruh penduduk Desa Tungke terhimpun dalam keluarga (rumah tangga). Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:



**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah	Presentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Matango	823	877	1.700	48
2.	Seppange	654	653	1.307	35
3.	Coppobulu	345	310	655	17

Sumber: Data Desa Tungke 2019

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa Desa Tungke memiliki jumlah penduduk, yaitu Dusun Matango terdiri dari 1.700 jiwa, Dusun Seppange 1.307 jiwa, dan Dusun Coppobulu 655 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah masyarakat di Desa Tungke dari tahun ke tahun dan terus mengalami pertumbuhan sehingga jumlah penduduknya semakin bertambah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut maka tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor juga semakin meningkat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

### 3. Visi dan Misi Desa Tungke

#### a) Visi

Visi pemerintahan Desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2016-2021 fungsi visi pemerintah Desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapiannya.

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Desa Tungke dalam periode 2016-2021 menetapkan visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Desa Tungke Yang Sejahtera, Damai, Tertib dan Demokratis”.**

b) Misi

Desa Tungke mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

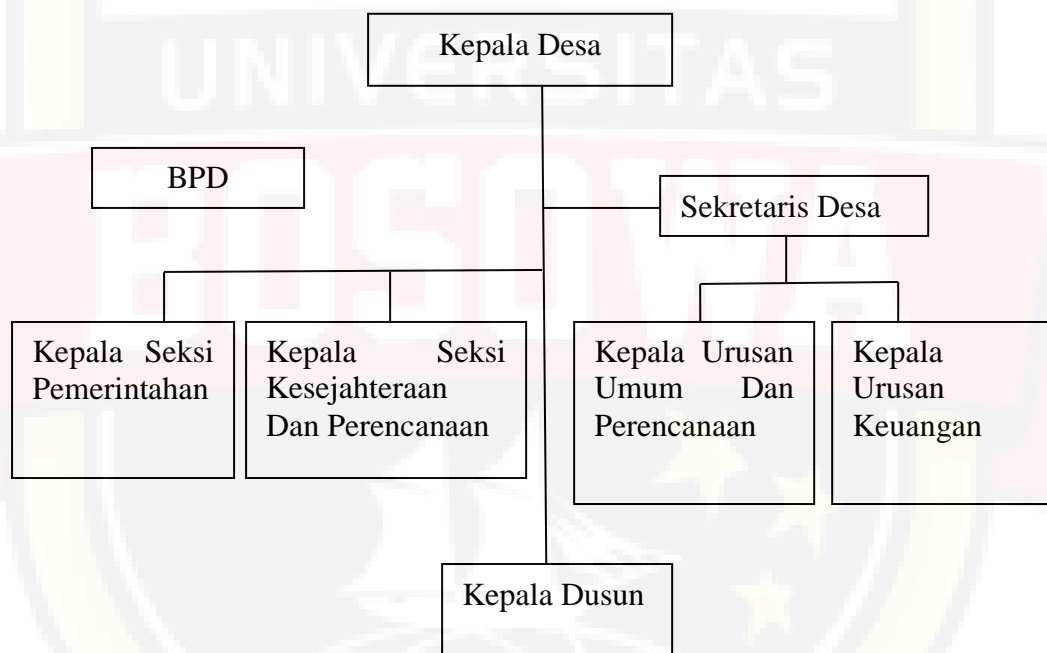
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas industry, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

c) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan organisasi pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur, Kadus dan lainnya.

**Gambar. 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**



## B. Hasil Penelitian

### 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa

#### Tungke

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo, yaitu mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

#### a. Partisipasi Masyarakat Desa Tungke dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo, partisipasi masyarakat dalam musyawarah atau musrembang desa, guna untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan menjadi acuan dalam rancangan pembangunan guna untuk mencapai sasaran pembangunan.

Hal tersebut, sesuai dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tungke (Ramli Hamid), sebagai berikut:

*“Pemerintah Desa bersama-sama masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan antusias masyarakat tergolong baik walaupun tingkat partisipasi belum maksimal. Akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut aspirasi masyarakat dijadikan acuan kemudian dijabarkan dalam RKPDes tahunan dengan menentukan prioritas pembangunan termasuk rancangan pembangunan infrastruktur, lalu dirumuskan dalam Surat Keputusan Kepala untuk dianggarkan dalam APBDDes tahunan berdasarkan peraturan Desa.” (Wawancara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo tergolong baik walaupun tingkat partisipasi masyarakat belum

se penuhnya berjalan secara optimal. Namun demikian, proses perencanaan tersebut Kepala Desa telah melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka.

Keikutsertaan masyarakat Desa Tungke dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya yaitu ikut dalam proses musyawarah rencana Pembangunan Desa. Berikut daftar nama-nama masyarakat yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2018-2019, yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Hadir Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan**  
**Desa Tungke Tahun 2018**

No.	Nama	Alamat/Dusun	Jabatan
1.	Drs. Cirwan	Langkai	Kasi Pem. Camat Bengo
2.	Sukri Hamid	Matango	Ketua BPD Desa Tungke
3.	Ramli Hamid	Matango	Kepala Desa Tungke
4.	Hamsinah, SH	Matango	Sekdes Tungke
5.	Yusri Bahjar, S.Si	Seppange	Imam Desa Tungke
6.	Abd. Rahman	Matango	Kadus Matango
7.	Ramang	Matango	Kaur Pembangunan
8.	Muh. Amin	Seppange	Kadus Seppange
9.	M. Yunus	Matango	Anggota BPD
10.	Darmawansyah	Seppange	Ketua Karang Taruna BMD
11.	Munawir	Seppange	Katua RW

12.	Haring Darise	Seppange	Ketua RT
13.	Hamma B	Coppobulu	Ketua RT
14.	Muh Akbar, SH	Coppobulu	Tokoh Masyarakat
15.	Hj. Nur Alam	Seppange	Anggota BPD
16.	Haside	Coppobulu	Ketua RT
17.	Taming	Coppobulu	Kadus Coppobulu
18.	Haruna	Matango	Anggota BPD
19.	Tare	Coppobulu	Tokoh Masyarakat
20.	Sahabuddin	Matango	Tokoh Agama
21.	Samsul	Seppange	Ketua RT
22.	Idrusman, S.Ag.	Seppange	Penyuluh Agama
23.	Bustan	Seppange	Ketua RT
24.	Hj. Kummi	Coppobulu	Anggota PKK
25.	Hj. Isha	Coppobulu	Anggota PKK
26.	Jumatang	Seppange	Anggota PKK
27.	Hj. Hasmia	Seppange	Anggota PKK
28.	Hj. Sutra	Matango	Anggota PKK
29.	Aminarsi	Matango	Anggota PKK
30.	Eka Kartini	Matango	Anggota PKK
31.	Asmar	Seppange	Tokoh Pemuda
32.	Masdaud	Seppange	Tokoh Masyarakat
33.	Tahang	Matango	Tokoh Masyarakat

*Sumber Data: Dokumentasi Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa Tungke pada tanggal 18 Januari 2019*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan dan perencanaan pembangunan namun tingkat kehadiran masyarakat masih tergolong rendah/kurang.

Sedangkan daftar nama-nama masyarakat yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2019-2020, yaitu:

**Tabel 4.4**  
**Daftar Hadir Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tungke Tahun 2019**

No.	Nama	Alamat/Dusun	Jabatan
1.	Hj. Samsuriana	Matango	Kasi Pemb. Camat Bengo
2.	Sukri Hamid	Matango	Ketua BPD Desa Tungke
3.	Ramli Hamid	Matango	Kepala Desa Tungke
4.	Hamsinah, SH	Matango	Sekdes Tungke
5.	Duming	Matango	Tokoh Masyarakat
6.	Sudirman	Seppange	Tokoh Masyarakat
7.	H. Abd. Wahab	Seppange	Tokoh Masyarakat
8.	Abd. Rahman	Matango	Kadus Matango
9.	H. Setrang	Matango	Tokoh Masyarakat
10.	Yusri Bahjar	Seppange	Imam Desa Tungke
11.	H. Rustang	Coppobulu	Tokoh Masyarakat
12.	Arif	Coppobulu	Tokoh Pemuda
13.	Darmawansyah	Seppange	Ketua KarangTaruna BMD
14.	Muh. Amin	Seppange	Kadus Seppange
15.	Hasriani	Matango	Penyuluh Agama
16.	Haring Darise	Seppange	Ketua RT
17.	Ramang	Coppobulu	Kaur Pembangunan
18.	Tare	Coppobulu	Tokoh Masyarakat
19.	H. Sadar	Matango	Tokoh Masyarakat
20.	Samsul	Seppange	Ketua RT
21.	Haruna	Matango	Anggota BPD
22.	Haside	Coppobulu	Ketua RT

23.	Sahabuddin	Matango	Tokoh Agama
24.	Hj. Hapsah	Seppange	Anggota PKK
25.	Muh. Basri	Seppange	Tokoh Agama
26.	Haminarsi	Matango	Anggota PKK
27.	Sida	Matango	Anggota PKK
28.	Jumatang	Seppange	Anggota PKK
29.	Nirwana	Coppobulu	Anggota PKK
30.	Hj. Isa	Coppobulu	Anggota PKK
31.	Munawir	Seppange	Ketua RW
32.	Arisal	Seppange	Tokoh Pemuda
33.	Marwati	Seppange	Anggota PKK
34.	M. Yunus	Matango	Anggota BPD
35.	Rappe	Seppange	Tokoh Masyarakat
36.	Ita Wahyuningsi	Seppange	Anggota PKK
37.	Suriati	Matango	Anggota PKK
38.	H. Rustang	Coppobulu	Tokoh Masyarakat
39.	Herwin	Matango	Tokoh Pemuda
40.	Baharuddin	Matango	Tokoh Masyarakat
41.	Reski Heriadi	Matango	Tokoh Pemuda

*Sumber Data: Dokumentasi Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa Tungke pada tanggal 18 Januari 2019*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan penyusunan rancangan pembangunan Desa Tungke jika dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan jika dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat walaupun tidak signifikan dan belum maksimal.



Kesadaran masyarakat Desa Tungke dalam proses pembangunan perlahan sudah mulai mengalami perubahan. Adapun daftar usulan masyarakat dalam musyawarah rencanapembangunan Desa sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Daftar Usulan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa**

<b>No.</b>	<b>Daftar usulan masyarakat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pembuatan Jalan Tani	
2	Pengerasan Jalan Desa	
3	Pembuatan Tempat Sampah	
4	Pembuata Jalan Usaha Tani	
5	Pemberdayaan Generasi Muda	
6	Pemberdayaan PKK	
7	Intensip Kader Posyandu	
8	Insentif kader Desa siaga	
9	Bantuan Guru Ngaji	
10	Pembinaan Olahraga	
11	Kegiatan Keagamaan	
12	Pengadaan Genangan Air	
13	Pengadaan omposon tikus	
14	Pembuatan Talud	
15	Pembersihan/ pemeliharaan lingkungan dusun	
16	Pagar Kantor Desa	
17	Zebra Cross/rambu penyebrangan jalan	
18	Pengadaan Plat Batas-Batas Dusun	
19	Rehabilitasi Posyandu/Polindes	
20	Rehabilitasi Peningkatan Jembatan Desa	
21	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Slokan	
22	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
23	Bimtek Teknologi Tepat Guna Pertanian	
24	Festival Tingkat Desa	
25	Pelatihan Wirausaha UMKM	
26	Peningkatan Produksi Taman Pangan	
27	Pembinaan pelatihan keterampilan	

28	Sosialisasi pelatihan keterampilan	
29	Mesin babat rumput	
30	Pembangunan Masjid Al-Mubarak Dusun Seppange	
31	Mobil perontok padi	

*Sumber data : Dokumentasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tungke Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 31 program usulan yang di musyawarahkan dalam perencanaan pembangunan Desa Tungke Program tersebut berasal dari masyarakat sendiri yang turut berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Akan tetapi dari semua jumlah usulan tersebut tidak semuanya yang dapat di laksanakan oleh Pemerintah Desa.

Partisipasi *non fisik* masyarakat yaitu berupa kehadiran dan menyalurkan aspirasi pemikiran terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Hal ini senada dengan wawancara oleh Kepala Desa Tungke bahwa:

*“Pembangunan yang ada di Desa Tungke sebagian besar adalah hasil musrenbang yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa Tungke, jadi mereka dalam hal ini masyarakat memang sudah turut berpartisipasi walaupun partisipasinya memang masih dikatakan kurang”. (Wawancara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada dasarnya masyarakat sudah terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dengan adanya musrenbang di Desa Tungke. Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh

adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan.

Pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo tidak sepenuhnya bergantung pada sumber anggaran pemerintah atau APBDes, akan tetapi juga bersumber dari swadaya masyarakat secara sukarela. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Matango Desa Tungke (Abd. Rahman), sebagai berikut :

*“Dalam pembangunan infrastruktur, ada yang dianggarkan pemerintah melalui APBDes tetapi ada juga yang bersumber dari swadaya masyarakat misalnya pembangunan Masjid, jalan Pemakaman Umum dan perintisan jalan tani. Khusus infrastruktur yang dilakukan secara swadaya yaitu murni dari hasil inisiatif masyarakat itu sendiri dengan musyawarah antara masyarakat dan Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian.” (Wawancara, 18 Juli 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keterlibatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo, telah berjalan dan tergolong baik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo, merupakan bentuk dukungan masyarakat untuk mencapai arah dan kebijakan/strategi pembangunan di Desa Tungke yang dituangkan dalam RPJMdes tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi Desa. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menjabarkan rumusan misi Desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama enam tahun.

Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam enam program pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan akan semakin mendekatkan Desa Tungke kepada visi pembangunan yang dipertegas pada RJPMDes Tungke 2016-2021, yaitu Terwujudnya Masyarakat Desa Tungke yang Sejahtera, Damai, Tertib dan Demokratis. RPJMDes dijabarkan dalam RKPDes tahunan yang dirumuskan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, dan APBDes tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

## **2) Partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Tungke dalam menggerakkan partisipasi masyarakat baik dalam menghimpun dana yang cukup demikian juga tenaga untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan.

Hal tersebut senada disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tungke (Ramli Hamid), bahwa :

*“Dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk uang dalam bentuk swadaya masyarakat yang bersifat suka rela, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhnya terhadap dana yang ada dari kabupaten”.  
(Wawamcara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Aparat Desa utamanya dalam hal ini masalah pembangunan. Cara yang dilakukan oleh desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat apabila ada yang ingin berkontribusi dalam hal

pebiayaan untuk pembangunan di Desa Tungke. Salah satunya pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat yaitu pembangunan Masjid *Al-Mubarak* di Dusun Seppange Desa Tungke. Pembangunan berkelanjutan tersebut terus menerus dilakukan guna memperbaharui masjid yang ada. Adapun sumber dana yang berasal dari pembangunan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Swadaya Masyarakat dalam Bentuk Uang di Desa Tungke**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Golongan</b>	<b>Besar Sumbangan (Rp)/Tahun</b>
PNS	14	IV	1.000.000.-
	18	III	500.000.-
	8	II	250.000.-
Pengusaha	12	-	1.000.000.-
Petani	300	-	250.000.-
<b>Jumlah</b>			<b>112.000.000.-/Tahun</b>

*Sumber data : Dokumentasi Kantor Desa Tungke 2019*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat partisipasi masyarakat di Desa Tungke khusus pada pembangunan masjid berupa sumbangan materi. Swadaya tersebut berdasarkan hasil keputusan musyawarah oleh sejumlah aparat Desa dan seluruh masyarakat yang memang secara sukarela mau berkontribusi untuk pembangunan masjid secara berkelanjutan.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Tungke (Hamsinah), bahwa :

*“...melalui musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Disamping*

*tenaga dan pikiran, masyarakat juga turut memberikan sumbangan materi secara suka rela untuk untuk pembangunan masjid, dimana Desa Tungke ini memiliki 6 (enam) buah Masjid, yaitu masing 2 (dua) buah masjid pada setiap Dusun, namun saat ini yang menjadi prioritas pembangunan yaitu Masjid Al-Mubarak Dusun Seppange yang sementara dalam tahap pelaksanaan pembanguan”. (Wawancara, 20 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, walaupun belum berjalan maksimal dan belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perintisan jalan (Talud) yang terletak di Dusun Matango Desa Tungke yang merupakan hasil dari musrenbang pada tahun tahun 2016 dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tungke tahun 2017, telah berjalan dan dapat terlaksana dengan dengan baik. Demikian juga pada pembuatan jalan tani dan/atau jalan perkuburan di Dusun Seppange Desa Tungke sepanjang 554 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Kegiatan Pembuatan/Perintisan Jalan di Desa Tungke**

No.	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana	Pengawas	Sumber Dana
1.	Pemberdayaan masyarakat Desa	Perintisan Jalan	Dusun Matango	50.600.000	Tim Pelaksana Kegiatan	Masyarakat	ADD 2017
2.	Pemberdayaan masyarakat Desa	Perintisan Jalan Usaha Tani	Dusun Seppange	53.150.500	Tim Pelaksana Kegiatan	Masyarakat	ADD 2018
2.	Pemberdayaan masyarakat Desa	Perintisan Jalan Tani	Dusun Seppange	51.780.000	Tim Pelaksana Kegiatan	Masyarakat	ADD 2019

*Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Tungke 2019*

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kegiatan pembuatan atau perintisan jalan yang ada di Desa Tungke berasal dari dana ADD Dusun Matango pada tahun 2017 dengan biaya sebesar Rp. 50.600.000 dan perintisan Jalan Usaha Tani pada tahun 2018 di Dusun Seppange dengan biaya sebesar Rp. 53.150.500. Demikian juga pada perintisan jalan tani di tahun 2019 dengan biaya Rp. 51.780.000, yang berdasarkan Peraturan Desa Tungke Nomor 1 tahun 2019 tentang rencana kerja Desa bahwa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya singkat dengan ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam kegiatan pembuatan jalan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini senada dengan pernyataan dari Kepala Dusun Seppange (Muh. Amin), bahwa:

*“...pembuatan jalan tani sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat setempatlah yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, walaupun masih ada banyak masyarakat tidak ikut berpartisipasi padahal pembuatan jalan itu untuk memudahkan aktivitas masyarakat setempat”. (Wawancara, 19 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat Desa Tungke dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, walaupun tingkat partisipasi tersebut belum maksimal karena masih ada masyarakat hanya sekedar menjadi penerima manfaat. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat (Sahabuddin), bahwa :

*“...masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendukung Pemerintah Desa yang disebabkan faktor politik karena perbedaan pilhan calon Kades”.* (Wawancara, 18 Juli 2019)

Hal senada juga disampaikan salah seorang Ketua Karang Taruna Desa Tungke (Darmawansyah), bahwa:

*“Partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam pelaksanaan pembangunan memang belum maksimal, disamping karena kurangnya kesadaran juga karena ketidak dewasaan sebagian masyarakat dalam berpolitik sehingga pasca Pilkades masih ada kelompok masyarakat yang tidak mau mendukung kebijakan Pemerintahan Desa karena hanya alasan beda dukungan”.* (Wawancara, 21 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum berjalan maksimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat termasuk dalam politik. Hal ini sejalan juga yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Tungke (Hamsinah), bahwa:

*“...faktor politik, kurangnya kesadaran, tidak ada rasa memiliki dari sebagian masyarakat memang menjadi kendala utama terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kedepannya Pemerintah menginginkan agar semua masyarakat tanpa terkecuali agar turut serta pada setiap pelaksanaan pembangunan karena pembangunan tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu, tapi semua masyarakat khususnya masyarakat Desa Tungke”.* (Wawancara, 20 Juli 2019)

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tungke Kecamatan Bengo, sudah berjalan namun tidak maksimal yang disebabkan faktor kesadaran dan faktor politik.



### 3) Partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam pengawasan pembangunan infrastruktur

Partisipasi masyarakat Desa Tungke pada tahap pengawasan pembangunan infrastruktur sudah terbilang baik. Partisipasi masyarakat diindikasikan sudah baik karena masyarakat pada awalnya turut bergotong royong membersihkan lahan yang akan digunakan, serta pembuatan jalan tani tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Disamping dalam pelaksanaan masyarakat juga turut serta mengawasi pekerjaan pembangunan tersebut sampai selesai.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ketua BPD (Sukri Hamid), bahwa:

*"Pembuatan jalan Tani yang ada di Dusun Seppange Desa Tungke mulai dari tahap persiapannya, hingga pada proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini berupa besarnya volume , material yang di pakai, hingga pada proses pengerjaannya sudah memenuhi syarat yang ada". (Wawancara 20 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan jalan tani di Desa Tungke pada tahun 2019 ini, telah selesai dan dikerjakan sesuai prosedur dan volume materil yang dipakai. Hal ini dapat diketahui berdasarkan laporan dari Tim Pengelola Kegiatan Pengawas dalam hal ini masyarakat setempat.

Hal tersebut sejalan dari pernyataan pengawas kegiatan (Munawir), bahwa:

*"...pelaksaan perintisan jalan tani di Dusun Seppange ini, masyarakat setempat ikut mengawasi proses pelakasanaan sampai pada penyelesaian pembangunan. Saya mewakili masyarakat setempat selaku*

*penanggungjawab pengawasan pelaksanaan pembangunan sudah melaporkan kepada pihak Kepala Desa, atas selesainya pembangunan itu". (Wawancara, 21 Juli 2019)*

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat setempat terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan salah seorang masyarakat ditunjuk langsung oleh pihak Pemerintah Desa untuk bertanggung jawab penuh melaporkan hasil pekerjaan pembangunan kepada pemerintah Desa. Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Desa Tungke, bahwa

*"Setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat terlibat langsung untuk mengawasi jalannya pembangunan itu, agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan yang ada, dan salah satu diantara mereka akan diberikan tanggungjawab untuk melaporkan hasil pembangunan kepada Pemerintah Desa untuk dievaluasi lebih lanjut". (Wawancara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tungke Nomor 11 tahun 2019 tentang penunjukkan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang menegaskan bahwa Tim pengelola kegiatan.

Berdasarkan surat keputusan diatas dijelaskan bahwa dalam pembuatan jalan tani tersebut dikelola oleh Tim Pengelola kegiatan (TPK). Sedangkan dalam bentuk evaluasinya diawasi langsung oleh BPD dan masyarakat. salah satu tugas dari BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Oleh karena itu, BPD berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kegiatan

pembuatan/perintisan jalan tani di Desa Tungke. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur telah berjalan di Desa Tungke. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Tim Pelaksana Pengawasan dan Evaluasi**  
**Pembuatan Jalan Tani Desa Tungke**

No.	Nama	Jabatan	Pencapaian
1.	Sukri Hamid	Ketua BPD	Baik
2.	Munawir	Masyarakat	

*Sumber Data: Dokumentasi Desa Tungke 2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat hasil evaluasi kategori baik. Pemeriksaan pembuatan jalan tani dilakukan tahun 2019. Setelah pemeriksaan akhir, tim pengelola kegiatan memberikan hasil dari pengawasan tersebut kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab selanjutnya.

## **2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke**

### **a. Sumbangan dan dukungan masyarakat**

Sumbangan dan dukungan masyarakat Desa Tungke baik fisik maupun *non fisik* adalah merupakan hal yang paling mendasar sehingga berbagai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke dapat terlaksana.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Desa Tungke (Sukri Hamid), bahwa :

*“...keberhasilan dan berbagai pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tungke ini semua berkat dukungan dan sumbangan masyarakat*

*baik berupa dana secara suka rela atau materi lainnya maupun non materi sehingga semua bisa berjalan lancar dan baik”. (Wawancara, 20 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan dan sumbangan masyarakat Desa Tungke, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke dapat berjalan lancar dengan baik. Seiring dengan hal tersebut, terakait sumbangan masyarakat berupa dana (uang) Kepala Desa Tungke menyampaikan bahwa :

*“...walaupun saat ini ada Alokasi Dana Desa, akan tetapi untuk pelaksanaan pembangunan secara maksimal sumbangan berupa dana atau uang sangat diharapkan dari semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara suka rela tanpa ada paksaan terutama dalam pembangunan berkelanjutan misalnya rehabilitasi masjid dan lainnya”. (Wawancara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo dalam segi anggaran bukan hanya tergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD), akan tetapi juga pada sumbangan masyarakat secara suka rela. Selain itu, bentuk sumbangan dan dukungan masyarakat Desa Tungke dalam pelaksanaan pembanguan infrastruktur, antara lain berupa pembebasan lahan secara suka rela dalam pembuatan jalan tani yang juga berfungsi sebagai jalan perkuburan/Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Seppange Desa Tungke. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Surat Pernyataan Penggunaan Lahan/Tanah**

No.	Nama Pemilik Lahan/Tanah	Pernyataan
1.	M. Jafar	<p>Saya sebagai pemilik lahan/tanah yang akan digunakan untuk pembuatan jalan tani dan/atau jalan perkuburan sepanjang 554 m yang terletak di Dusun Seppange Desa Tungke yang didanai oleh ADD Desa Tungke Kecamatan Bengo dengan ini menyatakan tidak keberatan/tidak menuntut ganti rugi atas tanah tersebut untuk kelancaran kegiatan Pembangunan di Desa Tungke Kecamatan Bengo demi kepentingan umum.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Mengetahui Kepala Desa Tungke dan Ketua TPK Desa Tungke</p>
2.	Jumadi	
3.	Sudirman S	

*Sumber data : Dokumentasi Desa Tungke 2019*

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa ada 3 orang pemilik lahan yang digunakan lahannya dalam pembuatan jalan tani dan/atau jalan perkuburan di Dusun Seppange Desa Tungke tersebut. Dalam pernyataannya mereka bersedia bahwa lahan yang digunakan diberikan secara suka rela tanpa adanya ganti rugi. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh bapak Kepala Desa dan Ketua TPK Desa Tungke.

Pernyataan tersebut, senada dengan pernyataan dari salah seorang pemilik lahan (M. Jafar) bahwa :

*“Memang benar lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan tani yang juga bisa berfungsi sebagai jalan perkuburan tersebut diberikan secara suka rela. Saya pribadi sebagai pemilik lahan menganggap bahwa lahan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil pembangunan tersebut. Saya pribadi juga nantinya akan turut merasakan dampak dari pembuatan jalan itu mengingat ada juga lokasi lahan sawah saya yang*

*apabila pembuatan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan maka akan sedikit mempermudah waktu tempuh saya. Walaupun memang perbandingan jarak tempuhnya tidak seberapa tapi akan lebih meringankan". (Wawancara, 25 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh salah satu pemilik lahan yang digunakan lahannya dalam pembuatan jalan tani yang juga akan berfungsi sebagai jalan utama menuju area perkuburan di Dusun Seppange Desa Tungke Kecamatan Bengo, bahwa dengan suka rela menyerahkan lahannya untuk pembangunan pada infrastruktur jalan di Desa Tungke.

Pembangunan infrastruktur yang baik turut memicu lajunya pertumbuhan ekonomi utamanya bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani.

#### b. Kesadaran atau kemauan

Realisasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tungke tidak bisa terlepas dari campur tangan dari masyarakat, tanpa adanya kemauan atau kesadaran masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Desa Tungke Kecamatan Bengo (Darmawansyah), bahwa:

*"...berbagai keberhasilan pelaksanaan pembangunan termasuk infrastruktur yang ada di Desa Tungke ini, karena adanya kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri, tanpa kesadaran masyarakat maka bisa dipastikan akan menghambat pelaksanaan pembangunan desa tidak akan bisa berjalan dengan semestinya". (Wawancara, 21 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tanpa adanya kesadaran atau kemauan masyarakat di Desa Tungke untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka akan mempengaruhi seluruh proses pembangunan yang ada di Desa Tungke.

Sejalan dengan itu, salah satu tokoh masyarakat (Sahabuddin) mengatakan bahwa :

*“...hambatan utama yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan saat ini yaitu karena masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum”. (Wawancara, 18 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat di Desa Tungke belum maksimal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini, dibenarkan oleh Kepala Desa Tungke, bahwa:

*“...terkait tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat memang belum menyeluruh sehingga kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tungke ini, namun kami selaku pemerintah terus melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat”. (Wawancara, 15 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menjadi faktor yang sangat penting untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Terkait masalah pembuatan jalan tani yang ada di Dusun Seppange Desa Tungke, berbagai tingkat partisipasi masyarakat muncul dalam pembuatan jalan tani tersebut. Dalam hal ini swadaya yang ada berupa tenaga. Bagi kaum pria yang memang merasa tidak berkecukupan mereka dengan suka rela bergotong royong membersihkan lahan yang akan digunakan untuk pembuatan jalan tani tersebut, walaupun masyarakat yang ada tidak seberapa.

Sedangkan, bagi kaum perempuan mereka disibukkan dengan menyediakan berbagai olahan masakan seperti kue dan teh hangat. Hal tersebut merupakan tingkat kemauan masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam pembuatan jalan tani. Tanah tersebut awalnya hanya berupa sawah dan kebun.

Kesadaran atau kemauan masyarakat Desa Tungke dalam pembuatan jalan tani juga salah satunya terlihat dari sikap masyarakat yang pada awalnya tidak begitu merespon pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa melalui pendekatan kekeluargaan maka perlahan kemauan untuk terlibat dalam pembuatan jalan tersebut mulai mendapat respon di tengah masyarakat.

#### c. Adanya Dana Desa

Dana Desa atau ADD Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan lagi.

Hal ini senada dikemukakan oleh salah satu masyarakat Desa Tungke (Munawir):

*“...Dana Desa kan memang di peruntuhkan untuk berbagai pembangunan yang ada di Desa. Jadi wajar kalau partisipasi sebagian masyarakat disini juga bervariasi karena adanya pemikiran bahwa dana tersebut dapat menutupi segala pembangunan di Desa Tungke”.*  
(Wawancara, 21 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Desa Tungke sebagian menganggap bahwa dana yang ada untuk Desa dapat menutupi dan membiayai segala keperluan dalam pembangunan yang ada di Desa. Hal



tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Desa. Padahal, dana Desa merupakan salah satu penggerak terjadinya pertumbuhan pembangunan di Desa. Pemerintah sebagai penyelenggara dari pembangunan tersebut harus memusatkan subyek pembangunan berdasarkan kebutuhan oleh masyarakat Desa Tungke. Akan tetapi, sebagai pelaksana kegiatan tentunya mempunyai tantangan dalam proses pembangunan.

Hal ini senada dikemukakan oleh Kepala BPD Desa Tungke (Sukri Hamid), bahwa:

*“Tantangan terbesar saat ini khususnya untuk seluruh aparat Pemerintah Desa yaitu bagaimana meyakinkan masyarakatnya agar dapat terus ikut andil dalam sejumlah pembangunan yang ada di Desa, mulai dari perencanaannya hingga pada proses pengawasannya tanpa memikirkan adanya bantuan dana dari Daerah ataupun dari provinsi.”* (Wawancara, 20 Juli 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Tungke bahwa:

*m “Harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah diajak langsung dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi namun mereka tetap lebih memilih acuh mereka dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada dana Desa.”* (Wawancara, 15 Juli 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa dana Desa yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa ternyata tidak begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Tungke. Terdapat sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja diladang mereka karena anggapan bahwa Pemerintah sudah mempunyai dana Desa. Jadi dalam pembuatan jalan baru tersebut

awalnya sedikit terkendala karena kurangnya biaya material dan juga faktor penghambat lainnya karena ada sebagian masyarakat yang tidak ingin berkontribusi dalam bentuk swadaya tenaga maupun materi.

Adanya dana Desa turut berdampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di Pedesaan khususnya Desa Tungke. Sedangkan, dampak negatif dari adanya dana Desa yaitu mengurangi tingkat gotong royong masyarakat. Hal tersebut senada dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Tungke (H.Muhammad R):

*“...dengan adanya Dana Desa dapat mendorong pemerataan pembangunan, namun disisi lain semangat gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan sudah mulai hilang”. (Wawancara, 17 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya dana desa diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, namun disisi lain nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat Desa Tungke mulai berkurang.

## **C. Pembahasan**

### **1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke**

Berdasarkan hasil dalam penelitian bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Tungke dalam proses pembangunan infrastruktur, sebagai berikut :

#### **a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan

partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. disamping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Bahkan tidak jarang pula terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Karena itu, sangat tepat kiranya bilamana pendekatan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) merupakan alat yang tepat untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. (Sjafrizal,2014:29)

Seiring dengan teori tersebut, partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo diimplementasikan melalui musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, dan hasil musyawarah tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusung rancangan pembangunan desa, walaupun tingkat kehadiran masyarakat masih tergolong masih rendah.

Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu pertama sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi,

dan sikap masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk *'urun rembug'* dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam perencanaan pembangunan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), tugas dan fungsi Kepala Seksi bagian kesejahteraan dan perencanaan di Desa Tungke Kecamatan Bengo, meliputi antara lain:

1. Melakukan koordinasi kepada Perbekel, Sekretaris, Kepala Seksi, Bendesa Adat, Pekaseh dan lembaga maupun kelompok yang ada di desa Tungke.
2. Menyetor data yang telah direkap dimemori kepada sekretaris.
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan dalam menyusun RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa.
4. Melaksanakan dan menginventarisir data-data dalam perencanaan maupun kegiatan Pembangunan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah direncanakan.
6. Membuat atau menyusun Laporan realisasi RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa.

Berdasarkan Undang- undang nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Desa

sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, ada empat bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga

kerja, uang tunai, dan atau bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.

### 3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

### 4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan sebagainya.

Secara umum tingkat partisipasi masyarakat Desa Tungke sudah melaksanakan poin tersebut mulai dari pengambilan keputusan walaupun terkadang tingkat partisipasinya masih dikatakan belum maksimal. Tingkat partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari pembangunan hingga keikutsertaan dalam

berbagai hal yang ada di Desa. Bentuk dari sumbangsih dari masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa berupa buah pikiran.

Keterlibatan berbagai pihak dalam hal ini adalah masyarakat luas yang merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka.

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan

pertimbangan. Pada tahap proses perencanaan inilah masyarakat Desa Pao mulai mempersiapkan bagaimana rancangan kedepan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena proses dari perencanaan merupakan suatu prosedur yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Dalam ketentuan umum Permendagri pasal 1 ayat 10, bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai pembangunan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat merasa turut dilibatkan dalam hal pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut Hobley mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :

- 1) Partisipasi Pasif yaitu Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan professional diluar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi informative yaitu Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi.
- 3) Partisipasi yaitu Masyarakat berpartisipasi dengan caraberkonsultasi.
- 4) Konsultatif yaitu tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
- 5) Partisipasi fungsional yaitu masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.



6) Partisipasi interaktif yaitu Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.

7) Zelf mobilization ( Mandiri)

Dari ketujuh tingkat partisipasi tersebut, partisipatif masyarakat dalam hal kolsultasi yang kurang di rasakan oleh masyarakat Desa Tungke seperti pada hasil wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan masyarakat Desa Tungke mengakibatkan adanya ketidakpuasan di tengah masyarakat ditambah lagi pada proses musyawarah dusun hanya dihadiri oleh Pemerintah Desa beserta Kepala Dusun Matango, Kepala Dusun Seppange, dan Kepala Dusun Coppobulu. Dalam musyawarah tersebut hal yang menjadi pembahasannya yaitu bagaimana merumuskan kebutuhan pembangunan di Desa Tungke yang nantinya akan dirapatkan lebih lanjut dalam tahap Musrenbang. Namun salah satu kekurangannya yaitu kurangnya warga yang hadir pada saat rapat tersebut.

Namun demikian Wilcox(Theresia 2014: 202) mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi.
- 2) Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

- 3) Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjamin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 5) Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Berdasarkan teori tersebut, dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tungke Kecamatan Bengo secara umum menunjukkan tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dengan terlibat secara langsung dalam proses musyawarah rencana Pembangunan Desa walaupun tingkat kehadiran belum maksimal.

#### b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 yaitu masyarakat bersama Pemerintah merupakan *stakeholder* dalam sebuah pembangunan. Artinya masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan, serta masyarakat juga diberikan peran yang cukup sentral. Dalam pembangunan agar kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahap atau proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam SOP yang memuat hal-hal pokok terkait dengan terselenggaranya pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian melalui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak ketiga ataupun swadaya masyarakat desa secara partisipatif.

Seiring dengan hal tersebut, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa tungke Kecamatan Bengo, walaupun sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat dalam hidup secara demokratis relatif rendah sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Desa.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ada rangsangan dari Pemerintah sangat penting terutama dengan

pendekatan tokoh-tokoh secara persuasif agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi yang tinggi.

Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Keterlibatan dari anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program dari pembangunan yang dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan nantinya tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berasal dari swadaya masyarakat yaitu pembangunan masjid yang berada di Dusun Seppange Desa Tungke, masyarakat dengan suka rela memberikan bantuan dan sumbangan setiap tahunnya untuk pembangunan berkelanjutan tersebut terus menerus dilakukan guna memperbaharui masjid yang ada.

Terkhusus pada pembangunan masjid. Swadaya tersebut berdasarkan hasil Keputusan musyawarah oleh sejumlah aparat Desa dan seluruh masyarakat yang memang secara sukarela mau berkontribusi untuk pembangunan masjid. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut didapatkan sejumlah kesepakatan yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai PNS ditetapkan membayar uang pembangunan sebesar Rp. 1.000.000 untuk golongan IV. Hal yang menjadi pertimbangan karena mereka dianggap

mampu dalam berkontribusi lebih besar dalam pembangunan masjid tersebut disesuaikan dengan pendapatannya pula yang cukup besar perbulannya. Sedangkan, bagi PNS yang memiliki golongan II dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000, dan untuk golongan III, pegawai tersebut hanya membayar senilai Rp. 500.000. Hal tersebut, tentunya berkaitan dengan kesadaran masyarakat Desa Tungke yang secara sadar dan sukarela ingin memberikan sumbangsih dalam bentuk dana. Dan bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha tergolong sukses sebesar Rp. 1.000.000 pertahun, bagi yang berprofesi sebagai petani di kenakan sebesar Rp. 250.000 pertahunnya. Jadi total jumlah pendapatan tetap yang diterima oleh panitia pembangunan pertahunnya sebesar Rp. 112.000.000 pertahun di luar dari sumbangan lain yang masuk. Mengingat bahwa dana merupakan salah satu penggerak utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk itu sangat diperlukan pula partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan kelancaran dalam pembangunan Desa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan populasi jumlah penduduk dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, maka tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Namun demikian masalah pembangunan dalam bentuk swadaya terkhusus untuk masalah pembangunan pada infrastruktur atau dalam hal ini pembuatan jalan tani yang ada di Desa Tungke, terdapat pula berbagai macam swadaya yang di dapatkan dengan suka rela, dimana masyarakat memberikan sebagian milik lahannya/tanah untuk dijadikan jalan tani tanpa menuntut ganti rugi. Walaupun pada prinsipnya dapat dianggarkan dalam dana desa yang

merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 2 yang menegaskan bahwa dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Disebabkan karena kesadaran masyarakat relatif masih rendah dalam hidup secara demokrasi.

c. Partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam pengawasan pembangunan infrastruktur

Dalam upaya pengawasan ada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan. Menurut Arikunto pengawasan program bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil pengawasan pembangunan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tungke, dalam kegiatan infrastruktur. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDES),

antara lain pembuatan jalan tani, Pembangunan Masjid, pembuatan talud, dan jembatan Desa yang merupakan hasil dari daftar usulan musyawarah rencana pembangunan Desa, sumber dana yang didapatkan berasal dari APBD, ADD dan Swadaya secara sukarela dari masyarakat. Dari semua sumber dana tersebut diharapkan muncul berbagai tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Terkhusus untuk pembangunan infrastruktur dalam hal ini pembuatan jalan baru memiliki sumber dana dari ADD yang jumlahnya sebesar Rp. 51.780.000. Dalam kegiatan pembuatan jalan itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa khususnya dusun Seppange dengan melibatkan masyarakat Desa Tungke sebagai pengawas dari pengerjaan pembuatan jalan tani tersebut.

Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat didasarkan atas dua pendekatan. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga dengan demikian adanya jaminan pola sikap dan pola pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan. Kedua, membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan pembangunan adalah menilai dan melihat secara sistematis untuk pencapaian target program sudah dilaksanakan dan sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai program. Berkaitan dengan tujuan dari

evaluasi, hal yang sangat penting dalam pembangunan yaitu adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Tungke Nomor 11 tahun 2019 tentang penunjukan tim pengelola kegiatan ( TPK) Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang menegaskan bahwa Tim pengelola kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tungke dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik dan tergolong cukup tinggi.

## **2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tungke**

### **a. Sumbangan dan dukungan masyarakat**

Pembangunan adalah merupakan upaya untuk dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Tungke merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena hakikat dari pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan Desa. Namun demikian, Tentunya tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu peningkatan berupa dukungan masyarakat Desa Tungke karena swadaya yang diberikan berupa lahan. Disini terlihat bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif.



Tanpa adanya dukungan dan sumbangan masyarakat Desa Tungke, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke dapat berjalan lancar dengan baik. Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali di Desa Tungke Kecamatan Bengo.

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, selain dibutuhkan adanya berupa sumbangan dana, dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah Desa turut serta diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri.

Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga Negara masyarakat berupa :

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
- d) sumber daya masyarakat.
- e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sejalan dengan teori diatas, salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yaitu berupa sumber daya masyarakat setempat yang merupakan kunci utama dalam setiap pembangunan di Desa Tungke, antara lain keberhasilan adanya pembuatan jalan tani yang juga berfungsi sebagai jalan perkuburan/Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Seppange Desa Tungke. Dimana lahan yang digunakan diberikan secara suka rela tanpa adanya ganti rugi. Disini terlihat bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif.

#### b. Kesadaran atau kemauan

Keikutsertaan dalam suatu proses pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Proses dari pembangunan di Desa tidak hanya membutuhkan tanggung jawab bersama akan tetapi dibutuhkan faktor kemauan untuk ikut langsung menyelesaikan pembangunan yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh verhangen.

Menurut verhangen (2015:197), sebagai suatu kegiatan partisipasi merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya

interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga Desa Tungke. Kesadaran atau tingkat kemauan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan tersebut terbilang sudah baik. Salah satu bukti bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu dengan membebaskan lahannya.

#### c. Adanya Dana Desa

Pentingnya kesadaran serta tanggung jawab sebagai manusia yang hidup ditengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya terkhusus dalam bidang pembangunan. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi , dana Desa juga

dapat menjadi faktor yang mampu mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Pasal 1 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dari kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tungke. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan lagi. Masyarakat Desa Tungke sebagian menganggap bahwa dana yang ada untuk Desa dapat menutupi dan membiayai segala keperluan dalam pembangunan yang ada di Desa. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Pengelolaan ADD merupakan keseluruhan tahap kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Bekaitan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian data dokumentasi dan hasil wawancara, perencanaan ADD pada Desa Tungke di Kecamatan

Bengo Kabupaten Bone diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdesa) untuk memperoleh RKPDesa yang disepakati. Setelah itu, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk di sampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada BPD untuk disepakati sesuai aturan yang berlaku yaitu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Melalui Camat Kecamatan Bengo Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bone. Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari kerja maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, sebaliknya apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator pengelolaan ADD terkait pengaruh partisipasi masyarakat di Desa Tungke terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuddin (2018) tentang analisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Tanah Karaeng

Kecamatan Manuju Kabuapten Gowa, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dan pengelolaan dana desa yang ada telah memenuhi prosedur yang berlaku. Namun masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

ADD di Desa Tungke lebih direalisasikan pada pembangunan fisik atau infrastruktur, masyarakat bertindak sebagai pengawas langsung untuk jalannya pembangunan sampai pada tahap penyelesaian. Pelaksanaan ADD di desa tungke menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ADD sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Demikian pula dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Dana Desa, yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan dan masyarakat hanya dapat bertindak sebagai pengawas sehingga nilai-nilai budaya gotong royong, kebersamaan masyarakat sudah mulai hilang, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Disamping itu, kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan dan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan melalui musrembang desa bahwa tingkat kehadiran dan antusias masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan dan relatif masih rendah. Sedangkan keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong baik dengan adanya sumbangan masyarakat berupa materi dana dan non materi pada pembangunan Masjid *Al-Mubarak* di Seppange Desa Tungke secara swadaya, serta dengan adanya pemberian lahan secara suka rela dari warga tanpa minta ganti rugi untuk pembuatan Talut. Sedangkan keterlibatan masyarakat tahap pengawasan relatif tinggi dilihat dari realisasi pembuatan jalan tani yang diawasi langsung oleh masyarakat setempat telah berjalan sesuai volume, biaya dan prosedur yang ada.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke yaitu keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke dapat berjalan dan diselesaikan dengan

baik, karena adanya partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk sumbangan dan dukungan moral maupun materil, kesadaran atau kemauan masyarakat dan adanya dana Desa.

## **B. Saran**

1. Untuk lebih memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah khususnya Pemerintah Desa, disamping memberikan pemahaman, motivasi juga harus lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dalam kepentingan pembangunan.
2. Pemerintah Desa diharapkan agar terus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program pembangunan, baik dalam proses maupun dalam pelaksanaan, agar setiap pembangunan dapat berjalan dan tepat pada sasaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Praja Soerjono. 2002. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Surabaya: Airlangga Pers
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anonim. 2019. *Enam Unsur-unsur Pokok dalam Perencanaan Pembangunan*. <https://www.google.com> ciburial desa id. Rabu 20 Februari Pukul 20.00 wita.
- Aprilia, Hera. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Program transmigrasi Lokal Model Ring Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kecamatan Panggang Kab. Gunung Kidul*. Yogyakarta:MPKD Universitas Gadjah Mada
- Aprilia Theresia, Krisnha dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chandra, Ekadkk. 2003. *Membangun Forum Warga "Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil"*. Bandung: Yayasan AKATIGA
- Ibid SaduWarsito. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Pustaka
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Kodoatie, R. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: pustaka Pelajar
- Miles & Huberman. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Indonesia: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Santoso, Sastropoetra. 2007. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Septyasa, Laksana Nuring. 2013. "Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vo.,1 No.1. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2019

- Siagian.S.P. 2014. *Administrasi Pembangunan*.Jakarta:Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*.Jakarta: PT Rajawali Pers
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sopi. 2013.*Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai tipe Madya*. Bandung
- Sorre, U.B. dkk. 2017. *Pedoman Standar Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Jurnal*. Makassar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus.2001.*Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.UM Press
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Partisipasi Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Partisipasi Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengertian Desa.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa



# LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

**I. Judul Penelitian**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGU  
KABUPATEN BONE**

**II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone?
2. Bagaimanan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone?

**III. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone?

**IV. Fokus Penelitian**

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengu Kabupaten Bone.

**V. Informan Penelitian**

Kepala Desa : 1 orang

Perangkat Desa : 2 orang

Masyarakat : 6 orang

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN**

No.	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Prediktor	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?	Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.	1.Perencanaan 2.Pelaksanaan 3.Pengawasan	1.Perencanaan pembangunan infrastruktur. 2. pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan. 3 Mengawasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.	Kepala Desa Perangkat Desa Masyarakat	Interview Dokumentasi
2.	Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?	Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.	1. Sumbangan dan dukungan masyarakat 2. Adanya Dana Desa 3. Tingkat kesadaran/kemauan masyarakat 4.	1. Masyarakat memberikan sumbangan dan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2. Adanya dana desa yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. 3. Tingkat Kesadaran/kemauan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.	Kepala Desa Perangkat Desa Masyarakat	Interview Dokumentasi

Lampiran 2: Panduan observasi

**Judul Penelitian:**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO  
KABUPATEN BONE**

**PANDUAN OBSERVASI**

**1. Observasi Umum Lokasi Penelitian**

Profil Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

**2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di  
Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone**

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan

**3. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di  
Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone**

- a. Sumbangan dan dukungan masyarakat
- b. Adanya dana desa
- c. Tingkat kemauan/kesadaran masyarakat

Lampiran 3: Pedoman Wawancara (*interview Guide*)

**Judul Penelitian:**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO  
KABUPATEN BONE**

**I. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone**

a. Perencanaan

1. Apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tungke Kecamatan Bengo?

b. Pelaksanaan

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?

c. Pengawasan

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?

**II. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone**

a. Sumbangan dan dukungan masyarakat

1. Apakah masyarakat memberikan sumbangan dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?

b. Adanya dana desa

1. Apakah pemerintah transparansi dalam mengelolah dana desa?

c. Tingkat kesadaran/kemauan masyarakat

1. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone?





Lampiran 4 : Daftar Nama dan Status Informan

**Judul Penelitian:**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA TUNGKE KECAMATAN BENGGO  
KABUPATEN BONE**

**DAFTAR NAMA DAN STATUS INFORMAN**

No	Nama	Status
1`	Ramli Hamid	Kepala Desa
2	Ramsinah, S.H	Sekretaris Desa
3	Sukri Hamid	Kepala BPD
4	Abd. Rahman	Kepala Dusun Matango
5	Muh. Amin	Kepala Dusun Seppange
6	Munawir	Ketua RW
7	Sahabuddin	Tokoh Masyarakat
8	Darmawansya	Tokoh Pemuda
9	M. Jafar	Warga Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN BENGGO  
DESA TUNGKE

Matango, 31 Juli 2019

Nomor : // 7 / TK / VII / 2019  
Lamp : -  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramli Hamid  
Jabatan : Kepala Desa Tungke  
Alamat : Matango Desa Tungke

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Fitria Nur  
Nim : 4515021018  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tungke selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai bulan Juni-Juli 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tungke Kecamatan Benggo Kabupaten Bone”**.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Tungke  
  
Ramli Hamid  


**Lampiran 5: Dokumentasi**

Kantor Desa Tungke



Wawancara dengan Staf Desa



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Talud



Perintisan Jalan



*Pembangunan Masjid Al-Mubarak*





FITRIA NUR, dilahirkan di Kabupaten Bone tepatnya di Dusun Seppange Desa Tungke Kecamatan Bengo pada tanggal 28 Januari 1997. Anak kelima dari lima bersaudara pasangan dari Kamasuddin Masy dan St. Noneng. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Inpres 3/77 Samaenre di Kecamatan Bengo Kabupaten Bone pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di SMPN 1 Lappariaja pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN Lappariaja pada tahun 2015. Pada Tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Bosowa Makassar (Unibos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.

**BOSOWA**

